

**ANALISIS INDEKS DESENTRALISASI FISKAL PADA
SATUAN WILAYAH PEMBANGUNAN (SWP) VII
PROPINSI JAWA TIMUR
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Ekonomi Pembangunan**



Oleh:

RAHADYAN YUNAN

0511010099/FE/IE

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
2012**

USULAN PENELITIAN
ANALISIS INDEKS DESENTRALISASI FISKAL PADA SATUAN
WILAYAH PEMBANGUNAN (SWP) VII PROPINSI JAWA TIMUR

yang diajukan

Rahadyan Yunan

0511010099

Telah disetujui untuk diseminarkan oleh:

Pembimbing Utama

Dra. Ec. Titiek Nurhidayati

Tanggal :

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi

Drs.Ec.Niniek Imaningsih,MP
NIP. 196111201987032001

USULAN PENELITIAN

ANALISIS INDEKS DESENTRALISASI FISKAL PADA SATUAN WILAYAH PEMBANGUNAN (SWP) VII PROPINSI JAWA TIMUR

yang diajukan

RAHADYAN YUNAN

0511010099FE/IE

Telah disetujui untuk diseminarkan oleh:

Pembimbing Utama

Dra. Ec. Titiek Nurhidayati

Tanggal :

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi

Drs.Ec.Niniek Imaningsih.MP
NIP. 196111201987032001

USULAN PENELITIAN

**ANALISIS INDEKS DESENTRALISASI FISKAL PADA SATUAN
WILAYAH PEMBANGUNAN (SWP) VII PROPINSI JAWA TIMUR**

yang diajukan

RAHADYAN YUNAN

0511010099/FE/IE

Telah diseminarkan dan disetujui untuk menyusun skripsi oleh:

Pembimbing Utama

Dra. Ec. Titiek Nurhidayati

Tanggal :

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi

Drs.Ec.Niniek Imaningsih,MP
NIP. 196111201987032001

**ANALISIS INDEKS DESENTRALISASI FISKAL PADA
SATUAN WILAYAH PEMBANGUNAN (SWP) VII PROPINSI
JAWA TIMUR**

yang diajukan

RAHADYAN YUNAN

0511010099/FE/IE

disetujui untuk Ujian Lisan oleh:

Pembimbing Utama

Dra. Ec. Titiek Nurhidayati

Tanggal :

**Mengetahui
Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jawa Timur**

**DRS.EC.RAHMAN AMIRULLAH.SUWAIDI,MS
NIP.196003301986031003**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat serta hidayah-Nya yang telah dilimpahkan sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu kewajiban mahasiswa untuk memenuhi tugas dan syarat akhir akademis di Perguruan Tinggi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Fakultas Ekonomi khususnya Jurusan Ilmu Ekonomi. Dalam penelitian skripsi ini peneliti mengambil judul **“Analisis Indeks Desentralisasi Fiskal Pada Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) VII Propinsi Jawa Timur”**.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa didalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang ada.

Atas terselesaikannya skripsi ini, peneliti menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.Ir.Teguh Sudarto,MP, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

2. Bapak Dr.Dhani Ichsanuddin Nur,SE,MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra.Ec Niniek Imaningsih,MP, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Drs.Ec Titik Nurhidayati.selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Wali yang telah meluangkan waktu dalam membimbing dan mendampingi peneliti selama menempuh pendidikan didalam perkuliahan.
5. Segenap staf pengajar dan staf kantor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, yang telah dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuannya dan pelayanan akademik bagi peneliti.
6. Ayah dan Bunda tercinta yang telah sabar mendidik dan membesarkan peneliti dengan penuh kasih sayang baik moral, material, maupun spiritual, dan juga untuk adik peneliti, semua perhatianmu tidak akan pernah peneliti lupakan.

Akhir kata yang dapat terucapkan semoga penyusunan skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan pihak-pihak lain yang membutuhkan, semoga Allah SWT memberikan balasan setimpal.

Wassallamualaikum Wr.Wb

Surabaya, Mei 2012

Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAKSI	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian-Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan Teori	12
2.2.1 Desentralisasi Fiskal	12
2.2.1.1 Sejarah Desentralisasi fiskal di Indonesia	16
2.2.1.2 Indikator Desentralisasi Fiskal	20

2.2.1.3	Keuntungan dan Kerugian Desentralisasi fiskal	23
2.2.2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	25
2.2.2.1	Sumber Pendapatan Daerah	28
2.2.2.2	Pendapatan Asli Daerah Sebagai Bagian dan Pendapatan Daerah	32
2.2.2.3	Penyebab Ketergantungan Fiskal	33
2.2.3	Prosentase Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP)	34
2.2.4	Sumbangan Daerah	40
2.2.4.1	Dana Alokasi Umum	40
2.2.4.2	Dana Alokasi Khusus	43
2.2.5	Pola Hubungan Keuangan dan Tingkat Kemandirian Daerah	45
2.2.6	Perwilayahan	47
2.3	Kerangka Pikir	50
2.4	Hipotesis	52

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	53
3.2	Jenis dan Sumber Data	54
3.2.1	Jenis Data	54
3.2.2	Sumber Data	54
3.3	Teknik Pengumpulan Data	54

3.4 Teknik Analisis	54
3.4.1 Index Desentralisasi Fiskal	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian	57
4.1.1 Gambaran Umum Wilayah	57
4.1.1.1 Kondisi Umum Kabupaten Tulungagung	57
4.1.1.1.1 Letak Geografis	57
4.1.1.1.2 Penduduk	58
4.1.1.2 Kondisi Umum Kabupaten Kediri.....	59
4.1.1.2.1 Letak Geografis	59
4.1.1.2.2 Penduduk	60
4.1.1.3 Kondisi Umum Kabupaten Blitar.....	61
4.1.1.3.1 Letak Geografis	61
4.1.1.3.2 Penduduk	62
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian	63
4.2.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah	63
4.2.2 Pajak Daerah.....	67
4.2.3 Restribusi Daerah	68
4.2.4 Laba Perusahaan Daerah	69
4.2.5 Lain-Lain PAD Yang Sah	69
4.2.6 Dana Perimbangan	70
4.2.7 Lain-lain Pendapatan yang Sah	71

4.3	Analisis Dan Pengujian Analisis Index Desentralisasi Fiskal...	71
4.3.1	Analisis Indeks Desentralisasi Fiskal	72
4.4	Alasan Naik Turunnya Indek Desentralisasi Fiskal	77

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan	79
5.2	Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar Kerangka Pikir	51
--------------------------------	----

DAFTAR TABEL

2.1	Perjalanan Desentralisasi Fiskal di Indonesia	18
2.2	Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal	22
2.3	Pola Hubungan Keuangan dan Tingkat Kemandirian Daerah	47
4.1	Perkembangan Penerimaan Daerah Tahun 2009/2010	65
4.2	Rasio Keuanagn Daerah Kabupaten Tulungagung 2009/2010	73
4.3	Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Kediri 2009/2010	74
4.4	Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Blitar 2009/2010	75

ABSTRAKSI

Dengan munculnya UU No .22 tahun 1999 yang mengatur perimbangan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah serta UU No.25 tahun 1999 yang mengatur perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Salah satu tujuan pemberian otonomi bagi daerah adalah untuk menambah kelancaran pembangunan di daerah dan terciptanya suatu kesinambungan pertumbuhan pembangunan yang dicapai serta pemerataan hasil-hasilnya. Dengan berlakunya Otonomi Daerah maka sebaiknya pemerintah daerah otonom diwajibkan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian maka pemerintah daerah otonom dapat merencanakan anggaran pendapatan dan belanja daerahnya sendiri sesuai dengan kebijaksanaan serta inisiatif sendiri dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya dan harus bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di daerahnya sendiri untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD sebagian besar masih berasal dari bantuan pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan salah satunya adalah Dana Alokasi Umum. Selayaknya Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) VII mengembangkan sumber daya lokal dan mengurangi ketergantungan dari pusat.

Skripsi ini bertujuan untuk membandingkan kemandirian suatu daerah pada SWP VII. Analisa yang digunakan adalah analisa kuantitatif, yaitu analisa yang sifatnya, menjelaskan secara uraian atau dalam bentuk kalimat-kalimat dan analisa kualitatif, yaitu analisa dengan menggunakan rumus-rumus dan analisa pasti. Analisa kuantitatif meliputi analisa Indeks Desentralisasi Fiskal (tingkat kemandirian daerah) sehingga dapat mengetahui di daerah SWP VII mempunyai kemandirian fiskal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Desentralisasi Fiskal SWP VII rata-rata menunjukkan rendah sekali. Pola hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah di kabupaten / kota di SWP VII adalah pola hubungan intruktif dan konsultatif. Sehingga dapat dikatakan selama periode penelitian SWP VII belum mampu membawa daerahnya / kurang mandiri.

Kata kunci : Desentralisasi fiskal, Kemandirian , SWP VII.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat serta hidayah-Nya yang telah dilimpahkan sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu kewajiban mahasiswa untuk memenuhi tugas dan syarat akhir akademis di Perguruan Tinggi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Fakultas Ekonomi khususnya Jurusan Ilmu Ekonomi. Dalam penelitian skripsi ini peneliti mengambil judul **“Analisis Indeks Desentralisasi Fiskal Pada Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) VII Propinsi Jawa Timur”**.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa didalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang ada.

Atas terselesaikannya skripsi ini, peneliti menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.Ir.Teguh Sudarto,MP, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

2. Bapak Dr.Dhani Ichsanuddin Nur,SE,MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra.Ec Niniek Imaningsih,MP, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Drs.Ec Titik Nurhidayati.selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Wali yang telah meluangkan waktu dalam membimbing dan mendampingi peneliti selama menempuh pendidikan didalam perkuliahan.
5. Segenap staf pengajar dan staf kantor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, yang telah dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuannya dan pelayanan akademik bagi peneliti.
6. Ayah dan Bunda tercinta yang telah sabar mendidik dan membesarkan peneliti dengan penuh kasih sayang baik moral, material, maupun spiritual, dan juga untuk adik peneliti, semua perhatianmu tidak akan pernah peneliti lupakan.

Akhir kata yang dapat terucapkan semoga penyusunan skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan pihak-pihak lain yang membutuhkan, semoga Allah SWT memberikan balasan setimpal.

Wassallamualaikum Wr.Wb

Surabaya, Mei 2012

Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAKSI	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian-Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan Teori	12
2.2.1 Desentralisasi Fiskal	12
2.2.1.1 Sejarah Desentralisasi fiskal di Indonesia	16
2.2.1.2 Indikator Desentralisasi Fiskal	20

2.2.1.3	Keuntungan dan Kerugian Desentralisasi fiskal	23
2.2.2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	25
2.2.2.1	Sumber Pendapatan Daerah	28
2.2.2.2	Pendapatan Asli Daerah Sebagai Bagian dan Pendapatan Daerah	32
2.2.2.3	Penyebab Ketergantungan Fiskal	33
2.2.3	Prosentase Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP)	34
2.2.4	Sumbangan Daerah	40
2.2.4.1	Dana Alokasi Umum	40
2.2.4.2	Dana Alokasi Khusus	43
2.2.5	Pola Hubungan Keuangan dan Tingkat Kemandirian Daerah	45
2.2.6	Perwilayahan	47
2.3	Kerangka Pikir	50
2.4	Hipotesis	52

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	53
3.2	Jenis dan Sumber Data	54
3.2.1	Jenis Data	54
3.2.2	Sumber Data	54
3.3	Teknik Pengumpulan Data	54

3.4 Teknik Analisis	54
3.4.1 Index Desentralisasi Fiskal	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian	57
4.1.1 Gambaran Umum Wilayah	57
4.1.1.1 Kondisi Umum Kabupaten Tulungagung	57
4.1.1.1.1 Letak Geografis	57
4.1.1.1.2 Penduduk	58
4.1.1.2 Kondisi Umum Kabupaten Kediri.....	59
4.1.1.2.1 Letak Geografis	59
4.1.1.2.2 Penduduk	60
4.1.1.3 Kondisi Umum Kabupaten Blitar.....	61
4.1.1.3.1 Letak Geografis	61
4.1.1.3.2 Penduduk	62
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian	63
4.2.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah	63
4.2.2 Pajak Daerah.....	67
4.2.3 Restribusi Daerah	68
4.2.4 Laba Perusahaan Daerah	69
4.2.5 Lain-Lain PAD Yang Sah	69
4.2.6 Dana Perimbangan	70
4.2.7 Lain-lain Pendapatan yang Sah	71

4.3	Analisis Dan Pengujian Analisis Index Desentralisasi Fiskal...	71
4.3.1	Analisis Indeks Desentralisasi Fiskal	72
4.4	Alasan Naik Turunnya Indek Desentralisasi Fiskal	77

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan	79
5.2	Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar Kerangka Pikir	51
--------------------------------	----

DAFTAR TABEL

2.1	Perjalanan Desentralisasi Fiskal di Indonesia	18
2.2	Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal	22
2.3	Pola Hubungan Keuangan dan Tingkat Kemandirian Daerah	47
4.1	Perkembangan Penerimaan Daerah Tahun 2009/2010	65
4.2	Rasio Keuanagn Daerah Kabupaten Tulungagung 2009/2010	73
4.3	Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Kediri 2009/2010	74
4.4	Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Blitar 2009/2010	75

ABSTRAKSI

Dengan munculnya UU No .22 tahun 1999 yang mengatur perimbangan wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah serta UUNo.25 tahun 1999 yang mengatur perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Salah satu tujuan pemberian otonomi bagi daerah adalah untuk menambah kelancaran pembangunan di daerah dan terciptanya suatu kesinambungan pertumbuhan pembangunan yang dicapai serta pemerataan hasil-hasilnya. Dengan berlakunya Otonomi Daerah maka sebaiknya pemerintah daerah otonom diwajibkan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian maka pemerintah daerah otonom dapat merencanakan anggaran pendapatan dan belanja daerahnya sendiri sesuai dengan kebijaksanaan serta inisiatif sendiri dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya dan harus bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di daerahnya sendiri untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD sebagian besar masih berasal dari bantuan pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan salah satunya adalah Dana Alokasi Umum. Selayaknya Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) VII mengembangkan sumber daya lokal dan mengurangi ketergantungan dari pusat.

Skripsi ini bertujuan untuk membandingkan kemandirian suatu daerah pada SWP VII. Analisa yang digunakan adalah analisa kuantitatif, yaitu analisa yang sifatnya, menjelaskan secara uraian atau dalam bentuk kalimat-kalimat dan analisa kualitatif, yaitu analisa dengan menggunakan rumus-rumus dan analisa pasti. Analisa kuantitatif meliputi analisa Indeks Desentralisasi Fiskal (tingkat kemandirian daerah) sehingga dapat mengetahui di daerah SWP VII mempunyai kemandirian fiskal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Desentralisasi Fiskal SWP VIII rata-rata menunjukkan rendah sekali. Pola hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah di kabupaten / kota di SWP VII adalah pola hubungan intruktif dan konsultatif. Sehingga dapat dikatakan selama periode penelitian SWP VII belum mampu membawa daerahnya / kurang mandiri.

Kata kunci : Desentralisasi fiskal, Kemandirian , SWP VII.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap daerah di Indonesia diberikan hak untuk melakukan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu tumpuan dan harapannya adalah dengan cara menggali dan mengoptimalisasikan Pendapatan Asli Daerah. Ada beberapa daerah yang mempunyai obsesi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan cara memberdayakan rakyat atau mengembangkan potensi yang ada seperti potensi budaya, obyek wisata serta industri rumah tangga yang banyak ragamnya dan selama ini sepertinya dibiarkan berjalan sendiri, seharusnya didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Sedangkan reformasi yang dimulai beberapa tahun lalu di Negara kita telah merambah ke seluruh aspek kehidupan. Salah satu aspek reformasi yang dominan adalah aspek pemerintahan. Aspek pemerintahan yang dimaksud disini adalah aspek hubungan pemerintah pusat dengan daerah. Pada aspek ini isu yang mencuat adalah adanya tuntutan otonomi yang lebih luas dan nyata yang harus diberikan kepada daerah. Oleh karenanya sejak per 1 Januari 2001 Bangsa dan Negara Indonesia memulai babak baru penyelenggaraan pemerintahan, dimana

otonomi daerah dilaksanakan di seluruh Dati II (kota dan kabupaten) yang jumlahnya mencapai 336. Hampir seluruh kewenangan pemerintah pusat diserahkan pada daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. Menurut bentuk-bentuk desentralisasi dalam era otonomi daerah adalah sebagai berikut; desentralisasi administratif, desentralisasi fiskal, desentralisasi politik, dan desentralisasi pelayanan.

Salah satu desentralisasi yang paling banyak disoroti dan paling berpengaruh terhadap perkembangan daerah adalah desentralisasi fiskal yang merupakan bagian penting dalam implementasi otonomi daerah. Kebijakan Fiskal pada dasarnya alat atau instrumen pemerintah yang sangat penting peranannya dalam sistem perekonomian. Instrumen fiskal itu berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas basis kegiatan ekonomi berbagai sektor, dan secara khusus memperluas lapangan usaha untuk menurunkan tingkat pengangguran. Dengan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi yang dikehendakinya. Kebijakan fiskal juga sekaligus sebagai kesempatan emas untuk memberikan sinyal, baik bagi pelaku ekonomi, dunia usaha, investor, maupun yang lainnya.

Selain itu juga isu desentralisasi yang dianggap sebagai jalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi telah menarik perhatian dari banyak ahli, antara lain dikemukakan oleh Tiebout, Oates, Tresch, Breton, Weingast, dan sebagaimana dikutip oleh Litvack et al dalam Sidik (2002) yang mengatakan bahwa pelayanan publik yang paling efisien seharusnya diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki kontrol geografis yang paling minimum karena :

1. Pemerintah lokal sangat menghayati kebutuhan masyarakatnya.
2. Keputusan pemerintah lokal sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga mendorong pemerintah lokal untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat.
3. Persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal untuk meningkatkan inovasinya.

Dalam hal ini, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah menjadi kewenangan daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan pengalihan sumber pendapatan asli daerah yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.

Dalam melaksanakan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu diadakan analisis faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP VII) yaitu Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Blitar.

Pembangunan nasional harus dilakukan melihat berbagai potensi yang ada dan harus dimanfaatkan seefisien mungkin. Mengingat keterbatasan tenaga yang professional maupun dana yang tersedia maka pembangunan nasional dilaksanakan secara bertahap melalui perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang. Pembangunan itu sendiri tentunya memerlukan biaya yang sangat besar. Kondisi yang demikian itu akan mendorong para pelaku pembangunan untuk lebih berorientasi kepada kemampuan sendiri. Dengan mengacu pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tentang asas desentralisasi maka dalam rangka melaksanakan pembangunan yang merata, berdaya guna dan berhasil guna maka dibentuklah daerah otonomi.

Dapat di terlihat bahwa desentralisasi kekuasaan dan distribusi pengambilan keputusan serta perimbangan keuangan yang pasti antara pusat dan daerah merupakan pilihan kebijakan strategi masa depan yang dapat di hindarkan dan di tunda dalam PJPT II. Indikasi ini setidaknya terlihat dari di luncurkannya Pakto 1993 yang pekat dengan nada desentralisasi dan di ikuti dengan penancangan proyek percontohan otonomi daerah pada 26 Dati II.

Diharapkan terjadi perubahan paradigma dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Dari budaya petunjuk menjadi penekanan prinsip demokrasi, prakasa, dan aspirasi masyarakat daerah. UU No. 22 dan 25 tahun 1999, beserta serangkaian Peraturan Pemerintah, mencoba memberikan alternatif format otonomi daerah yang baru. Ini terlihat dari adanya kesadaran bahwa "pembangunan di daerah" tidak identik dengan "pembangunan daerah". Perubahan struktural yang layak di catat berkat UU ini adalah pelaksanaan otonomi secara utuh dan luas di kabupaten dan kota, sedang provinsi hanya memiliki otonomi daerah terbatas.

Sebelum dikeluarkannya undang-undang otonomi daerah tahun 1999, sumber keuangan daerah baik propinsi, kabupaten, maupun kotamadya menurut UU nomor 5 tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Asli Daerah (PAD).
2. Bagi hasil pajak dan non pajak.
3. Bantuan pusat (APBN) untuk daerah tingkat I dan tingkat II
4. Pinjaman daerah.
5. Sisa lebih anggaran tahun lalu.
6. Lain-lain penerimaan daerah yang sah.

Desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenangan dari pemerintah pusat ke level pemerintah yg ada di bawahnya di bidang penerimaan anggaran atau keuangan. Oleh karena itu, makna desentralisasi fiskal di bidang keuangan kepada daerah-daerah merupakan suatu proses pengintensifikasian peranan dan

sekaligus pemberdayaan daerah dalam pembangunan.

Suatu ekonomi ruang yang berada dibawah suatu administrasi tertentu seperti satu propinsi, kabupaten, desa dan sebagainya. Daerah menurut pengertian ini disebut daerah administrasi atau daerah perencanaan. Konsep daerah berdasarkan administarsi pemerintah biasanya terkait pada sejarah yang telah ditetapkan oleh undang-undang, sehingga tidak mudah diubah, maka daerah administrative di Indonesia terbagi atas daerah propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, dan lingkungan/dusun. Maka dari ini propinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, lingkungan yang mandiri dan tidak mandiri akan terlihat jelas dari perkembangan prencanaan pembangunannya. Jika membahas perencanaan pembangunan diperlukan tindakan dari pemerintah yang lebih praktis dan mudah dengan cara meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan cara memberdayakan rakyat atau mengembangkan potensi yang ada seperti potensi budaya, obyek wisata serta industri rumah tangga yang banyak ragamnya dan selama ini sepertinya dibiarkan berjalan sendiri, dan didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.